

**Refleksi Akhir Tahun Papua 2010:
“Meretas Jalan Damai
Papua”**

Oleh Dr. Muridan S. Widjojo
(Koordinator Tim Kajian Papua LIPI)

Ballroom B Hotel Aryaduta Jakarta,
Senin, 13 Desember 2010

Refleksi:



1. catatan peristiwa politik Papua 2010;
2. *update* perkembangan upaya untuk membangun dukungan pra-dialog Jakarta-Papua.

Bagian Pertama:

Catatan peristiwa politik Papua 2010



Catatan peristiwa politik Papua 2010

1. SK 14/2009 MRP dan pengembalian Otsus;
2. Perlawanan Bersenjata TPN/OPM, Counter Insurgency Polri/TNI, dan Video Penyiksaan;
3. Internasionalisasi masalah Papua; dan
4. Perhatian pemerintah terhadap Papua.

**SK 14/2009 Majelis Rakyat Papua (MRP)
dan Pengembalian Otsus**



- MRP SK 14/2009 calon bupati/walikota dan wakilnya harus orang asli Papua.
- Mendagri Gamawan Fauzi menilai SK tersebut bertentangan dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara karena dinilai sangat diskriminatif
- Demo ribuan massa di Jayapura pada 18 Juni dan 8 Juli 2010 mengembalikan Otsus ke pemerintah pusat.

- Presiden memerintahkan tiga Menko ke Papua
- Kesimpulan untuk merevisi Inpres 5/2007 tentang percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat
- Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)

Catatan

1. ketidakpercayaan pada pemerintah dalam implementasi Otsus
2. kebuntuan politik Jakarta-Papua menjadikan fondasi politik di Papua sangat lemah dan mudah terguncang.
3. pemerintah memandang remeh kasus pengembalian Otsus hanya sebagai hasil provokasi segelintir pimpinan MRP yang masa jabatannya akan berakhir.

Perlawanan TPN/OPM, Represi Polri/TNI, dan Video Penyiksaan



- Sepanjang 2010 nampak bahwa TPN/OPM di Puncak Jaya Provinsi Papua semakin agresif.
- Selama 2010, tercatat sekitar 17 kali kontak senjata dan serangan.
- Dewan Adat Papua (DAP) menyatakan aparat Polri/TNI melakukan pelanggaran HAM.
- Pada Oktober 2010 muncul klip video yang berisi penyiksaan oleh anggota TNI untuk mendapatkan pengakuan tentang lokasi penyimpanan senjata.
- Video kekerasan TNI diunggah di Youtube oleh Asian Human Rights Commission (AHRC).

- Presiden SBY memerintahkan Panglima TNI dan Menhan untuk mengambil tindakan hukum.
- Dalam 10 hari vonis sudah bisa dijatuhkan oleh pengadilan militer. Komandannya dihukum 7 bulan dan 4 anak buahnya 5 bulan.
- Tuntutan pengadilan HAM diabaikan oleh pemerintah
- Pada 28 November 2010, terjadi aksi penembakan beruntun di Nafri Jayapura oleh orang tak dikenal. Satu tewas dan empat terluka.

- Pendekatan keamanan dalam bentuk operasi militer dan penegakan hukum secara represif terhadap kegiatan dan aspirasi separatisme telah gagal.
- Akibat pendekatan represif, daftar pelanggaran HAM sebagai eksekusi kekerasan politik terus bertambah panjang.
- Fondasi politik Papua untuk membangun demokrasi dan perdamaian di Indonesia semakin rapuh.

Internasionalisasi Isu Papua



- Pada 19 Juni 2010 Perdana Menteri Vanuatu dan pemimpin oposisi di parlemen bersepakat untuk membuat mosi politik kepada Sekjen PBB
- Pada 1 Agustus 2010 50 anggota Konggres AS menulis surat kepada Presiden Obama agar menempatkan “West Papua” sebagai salah satu prioritas tertinggi selama pemerintahannya.
- US House Committee on Foreign Affairs menyelenggarakan *hearing* selama 2 hari, 22-23 September 2010 tentang pelanggaran HAM di Papua
- Pidato Presiden Amerika Barack Obama di Universitas Indonesia 10 November 2010

- Menlu RI Marti Natalegawa mengakui bahwa isu HAM merupakan isu yang masih efektif sebagai pintu masuk internasionalisasi masalah Papua.
- Derajat bahaya internasionalisasi isu Papua bergantung pada kinerja pemerintah di dalam negeri dalam menyelesaikan masalah HAM di Papua

Perhatian Pemerintah terhadap Papua



- Pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2010, Presiden SBY menjanjikan “komunikasi konstruktif” penyelesaian masalah Papua
- Presiden SBY berkunjung ke Papua dua kali: 14 Oktober 2010 ke Wasior dan Jayapura pada 21 November 2010.
- Presiden SBY tanggap pada kasus video penyiksaan oleh prajurit TNI
- Pemerintah Pusat mulai melihat bahwa selain pembangunan sosial ekonomi, pembangunan (atau penyelesaian) politik konflik Papua harus juga diberikan tempat.

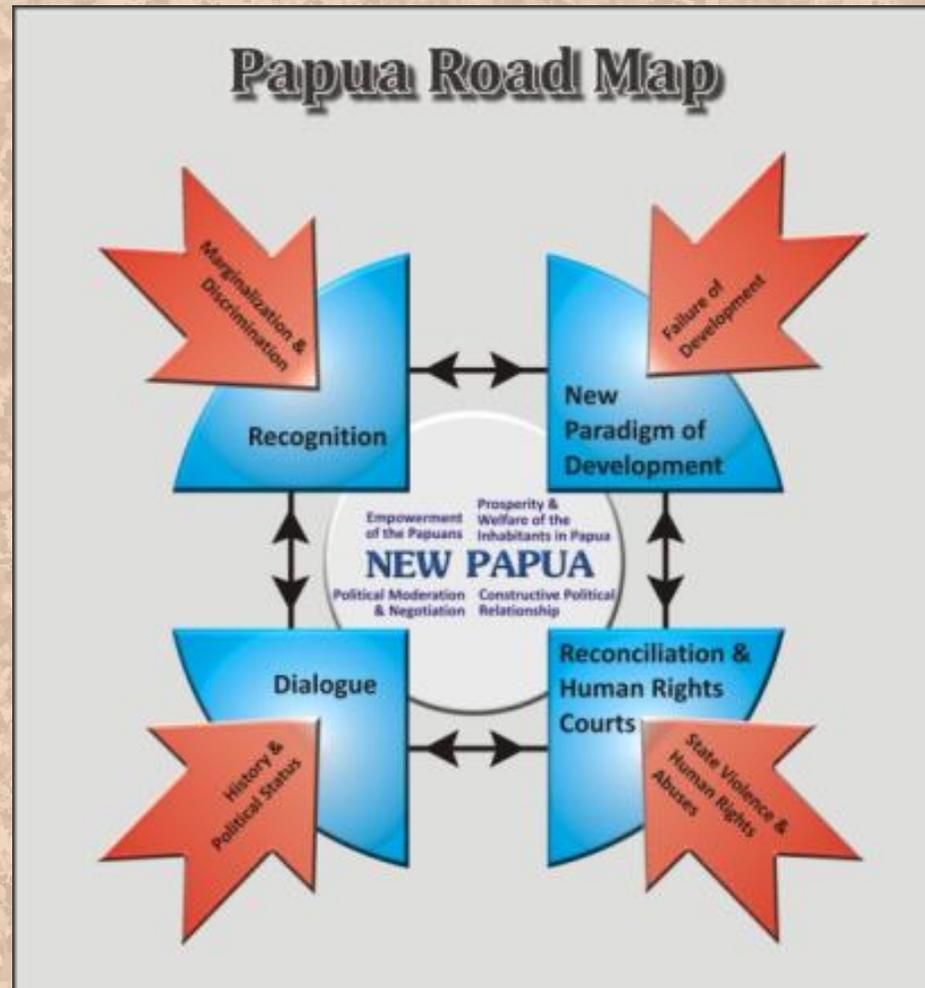
Bagian Kedua:

***Update* perkembangan upaya dan dukungan pra-dialog Jakarta-Papua**



- Papua masih di dalam tahap konflik.
- Serangan TPN/OPM semakin agresif dan operasi militer/polisi masih akan terus terjadi.
- Pelanggaran HAM dipastikan akan terjadi lagi.
- Implementasi Otsus semakin macet.
- Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah berada pada titik yang paling tinggi.

Papua Road Map: 4 jalan meretas perdamaian dan keadilan di Papua



1. pemihakan, perlindungan dan pemberdayaan untuk mengatasi marjinalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua;
2. paradigma baru pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi budaya dan geografis Papua untuk mengatasi kegagalan pembangunan;
3. jalan rekonsiliasi dan pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang; dan
4. dialog antara Jakarta dan Papua untuk mengakhiri konflik politik dan membawa Papua ke suatu tahap pasca konflik.

Jalan Damai

- 2009-2010 di Jakarta, konstituen dialog Jakarta-Papua terbangun di kalangan LSM, organisasi keagamaan, parlemen, partai politik, wartawan, pribadi-pribadi yang memiliki pengaruh politik, dan kementerian dan lembaga negara di Jakarta.
- Di Jakarta, upaya untuk menciptakan kondisi yang positif untuk menerima dialog sebagai jalan keluar konflik Papua sudah menjadi kerja bersama oleh banyak tokoh yang bisa kita sebut sebagai *friends of dialogue*

- Pada 2010 telah didirikan Jaringan Damai Papua (JDP).
- Jaringan ini merekrut dan melatih sekitar 30 orang Papua dan non-Papua dari berbagai elemen sosial, agama dan faksi politik untuk menjadi fasilitator dan mediator pra-dialog
- sosialisasi konsep dialog Jakarta-Papua dan menggalang dukungan serta mengumpulkan pendapat pemimpin Papua di tingkat akar rumput.

- Selama awal 2010, JDP telah menyelenggarakan konsultasi publik di sebelas wilayah kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat dan terus dilanjutkan.
- Jaringan JDP membesar dan dukungan terhadap gagasan dialog Jakarta-Papua telah meluas di Papua.

Dukungan di kalangan pemerintah untuk pra-dialog semakin terbuka dan menguat.

- semakin banyak pejabat tinggi yang tidak lagi resisten pada gagasan dialog
- pidato Presiden SBY yang menjanjikan komunikasi konstruktif antara Jakarta dan Papua.
- ketegasan Presiden SBY untuk memerintahkan penegakan hukum terkait video penyiksaan;

- peran Wakil Presiden Boediono yang semakin aktif dalam menangani Papua;
- perkembangan di internal pemerintah pusat yang sejalan dengan janji presiden dan menunjukkan adanya kemauan untuk membuat langkah terobosan politik pada 2011.